



Buletin Parlementaria

Nomor 1023/I/IX/2018 • September 2018

RANGKAIAN KEGIATAN
HUT DPR RI KE-73

RABU, 29 AGUSTUS 2018



Lomba

Stand Up C

DPR Now!
Perwujudan
Parlemen Modern



9 772614 339005

DPR Garda Terdepan Jaga Indonesia

DPR Now! Perwujudan Parlemen Modern

Aplikasi “DPR Now! DPR Dalam Genggaman Rakyat” diluncurkan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, aplikasi “DPR Now!” merupakan salah satu perwujudan DPR RI menuju Parlemen Modern. Dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi digital, DPR RI bisa hadir di tengah-tengah rakyat.

“Rakyat tidak perlu lagi bertanya-tanya sedang apa Anggota DPR di kantornya, cukup dipantau melalui *smartphone*.”

Dengan aplikasi DPR Now!, ada konten yang memuat aktifitas DPR dari Komisi I-XI,” terang Bamsuet, sapaan akrabnya, saat *launching* aplikasi “DPR Now!”, di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Pimpinan DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut mendampingi Bamsuet menekan tombol peluncuran aplikasi “DPR Now!”, dengan disaksikan sejumlah Anggota DPR RI dan duta besar negara sahabat. Kini, aplikasi DPR Now! sudah bisa diunduh di *App Store* untuk *smartphone* berbasis iOS, dan *Google Play* untuk *smartphone* Android.

Menurut Bamsuet, dengan aplikasi “DPR Now!” seluruh Anggota DPR RI bisa berbangga hati. Masyarakat bisa menyaksikan dengan langsung kritik yang

dilayangkan DPR RI terhadap pemerintah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Termasuk juga, masyarakat bisa mengetahui aspirasinya telah disampaikan DPR RI kepada pemerintah.

“Masyarakat juga bisa mengakses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas. Kemudian kesimpulan dari rapat sudah bisa diakses satu jam setelah rapat dinyatakan selesai,” tambah politisi Partai Golkar ini, seraya menambahkan dalam kesempatan ini juga digelar pencanangan *Open Parliament* atau Keterbukaan Parlemen.

Keinginan DPR RI untuk terus berbenah mulai menampilkan hasil. Salah satu buktinya yaitu meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini. Berdasarkan rilis “Survei Persepsi Publik Mengenai Kinerja DPR RI” yang dilakukan Charta Politika, DPR RI menempati urutan ke 5 setelah TNI, KPK, Presiden dan Polri.

“Sebelumnya pada survei tingkat kepercayaan publik, kita selalu nomor

dua dari bawah setelah partai politik. Kali ini kita lompat melampaui 3 institusi yaitu Mahkamah Agung (MA) RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,” bangga politisi dapil Jawa Tengah ini.

Pada kesempatan itu pula, Bamsuet menyatakan sebagai rumah rakyat, sejatinya DPR RI harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kesempatan. Tak terkecuali dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 DPR RI ini, DPR RI mengadakan beberapa perlombaan diantaranya lomba *stand up comedy*, *meme*, dan esai “Kritik DPR”, lomba “Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat”, dan lomba “Panjat Bambu Betung”.

“DPR ingin terus membunih dengan rakyat dan bersama-sama merasakan kegirangan,” tegas Bamsuet, sembari menambahkan bahwa melibatkan masyarakat adalah bagian dari partisipasi politik yang lumrah dalam demokrasi. Sebab tanpa dukungan rakyat, keputusan DPR RI tidak akan punya makna sama sekali. ■ es/sf



Pimpinan DPR RI meluncurkan aplikasi “DPR Now! Dalam Genggaman Rakyat”

Foto: Jaka/hr

Open Parliament Dekatkan DPR Dengan Rakyat

Pencanangan Keterbukaan Parlemen (Open Parliament) yang bertepatan dengan HUT ke-73 DPR RI merupakan salah satu momen bersejarah bagi perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya keterbukaan parlemen dapat semakin mendekatkan DPR dengan rakyat.

Demikian mengemuka dalam deklarasi *Open Parliament* yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Selain Pimpinan, Anggota, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, acara ini juga dihadiri sejumlah duta besar negara-negara sahabat.

“Adanya pencanangan ini, komitmen dan praktik Keterbukaan Parlemen di DPR RI, kita dorong supaya menjadi dekat dengan masyarakat. Serta, semakin memperkuat peran DPR RI dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik,” ungkap Fadli.

Inisiatif *Open Parliament* adalah kesinambungan dari *Open Government Partnership* (OGP), dimana Indonesia memegang andil penting sebagai salah satu pendiri OGP. Sedikitnya sembilan parlemen yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen, yakni Chile, Perancis, Georgia, Ukraina, Kostarika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo.

Artinya, politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, dengan bergabungnya DPR RI dalam *Open Parliament*, maka DPR RI akan menjadi parlemen ke-10 yang berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan parlemen.

Fadli menambahkan, meskipun baru hari ini DPR RI mendeklarasikan keterbukaan parlemen, namun sejatinya DPR RI telah menjalankan keterbukaan parlemen sejak lama.

Seperti keterbukaan rapat, keterbukaan legislasi, keterbukaan anggaran, dan keterbukaan pengawasan.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Foto: Jaka/hr

Dengan bergabungnya DPR RI dalam *Open Parliament*, maka DPR RI akan menjadi parlemen ke-10 yang berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan parlemen.

Begitupun di dalam aspek keterbukaan dokumen dan penerapan teknologi digital, sebagai penguat jalur komunikasi DPR RI dengan masyarakat.

“Ke depan, kami berkomitmen terbuka untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil secara berkelanjutan demi mewujudkan lembaga legislatif yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” harap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu.

Selain itu, sebagai pelopor, DPR RI menjadi parlemen pertama yang menyusun rencana aksi keterbukaan

terpisah dari pemerintahnya. Ini juga merupakan satu langkah maju bagi peran serta parlemen Indonesia di tingkat global.

Ia menuturkan, terdapat lima agenda yang akan didorong dalam dokumen Rencana Aksi Nasional atau *National Action Plan* (NAP), antara lain: keterbukaan proses legislasi, penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan penggunaan IT untuk menjangkau konstituen, pelembagaan *Open Parliament* Indonesia serta penyusunan peta jalan keterbukaan parlemen.

“Kelima hal tersebut akan menjadi kerangka kerja DPR RI dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan. Dengan ini pula, keterbukaan menjadi wujud pelaksanaan yang berkesinambungan dari Parlemen Modern yang kita idamkan,” tandas politisi dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, keterbukaan parlemen atau *Open Parliament*, merupakan inisiatif global yang dideklarasikan pada 15 Desember 2012, dalam *International Parliamentary Union* (IPU) – *World e-Parliament* di Roma, Italia. Inisiatif ini didukung oleh 180 organisasi dan 82 negara. ■ ann/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan hadiah sepeda motor Vespa kepada juara terbaik lomba "Kritik DPR"

DPR Beri Kesempatan Rakyat Sampaikan Kritik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan hadiah kepada para pemenang Lomba Kritik DPR dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-73 DPR RI. Lomba ini ada tiga kategori, yakni esai, *meme*, dan *stand up comedy*. Ia menyampaikan, tradisi kritik yang lucu dan menghibur seperti *stand up comedy* bisa dilanjutkan.

“Justu kami membutuhkan kritik, bukan anti kritik. Maka kami memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritiknya secara baik dan yang terbaik kami beri hadiah. Inilah *the best of the best*-nya, kami berikan hadiah sepeda motor Vespa,” papar Bamsuet, sapaan akrabnya, usai penyerahan hadiah kepada para pemenang, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Dalam babak final lomba *stand up comedy* yang menampilkan 10 komika, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menambahkan hadiah Rp 20 juta dari uang pribadinya. Tak mau ketinggalan, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga ikut menambahkan Rp20 juta. Sedianya, total hadiah lomba *stand up comedy* sebesar Rp10 juta, sehingga kini totalnya Rp50 juta.

Pemenang lomba *stand up comedy* diumumkan oleh komedian Cak Lontong, yang juga bertugas sebagai juri pada perlombaan ini. Juara tiga dengan nilai total, 244 dimenangkan oleh Kiki, kemudian juara kedua dengan nilai total 264 oleh Marsel, juara pertama dimenangkan oleh Aji Pratama dengan total skor 266.

“Kita menilai dari sisi-sisi yang berkaitan dengan kaidah *stand up* dan juga tema yang kita berikan. Selucu apapun kalau tidak ada yang tertawa berarti tidak lucu, itu indikator pertama buat kita. *Stand up comedy* harus lucu apapun isinya. tidak hanya lucu yang kita nilai, tapi yang tidak lucu tidak kita nilai,” kelakar Cak Lontong yang spontan mengundang gelak tawa para penonton.

Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali

yang juga juri pada perlombaan ini menambahkan, dari kategori esai, antusias pengikutnya banyak sekali. Ada sekitar seribu lebih pengirim, namun setelah diseleksi terpilih menjadi 25 kritik esai.

“Esai ini luar biasa banyak sekali seribu lebih, setelah diseleksi tinggal 25,” ujar Effendi.

Pemenang pertama dari kategori esai menyajikan tulisannya dengan sangat bagus, diberi judul “Kritik Setandan Pisang”. Penulisnya menceritakan asal mula korupsi dari *study-study antropology*. Dalam esainya, ia menceritakan dulu bangsawan dikasih gratifikasi dalam bentuk apapun ditolak.

Effendi menguraikan esai tersebut, bahwa dulu pemerintah dikasih apapun tidak mau. Tapi lama-lama karena pemerintah dan bangsawan merasa beban yang mereka tanggung ketika memperhatikan rakyat makin lama makin besar, tidak seimbang dengan pemasukannya, lama-lama mereka mau dan senang menerima setandan pisang yang diberikan oleh rakyat.

Pemenang lomba esai “Kritik DPR” pengumumannya disampaikan oleh Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Dia mengumumkan dari pemenang ketiga, Dara Salsabila, dengan judul esai “Mau Hak kok Kerja Lamban”.

Pemenang kedua Abdul Wahid dari DI Yogyakarta, tulisannya berkaitan dengan sikap politik DPR RI demi kepentingan masyarakat majemuk, atau kelompok tertentu. Pemenang pertama diperoleh Alif Syuhada dari Purwokerto, judul esainya “Kritik Standan pisang”.

Sedangkan pemenang “Kritik DPR” lewat media *meme* diumumkan oleh Pakar Budaya, Prof Martani Huseini. Dengan Pemenang ketiga, Utoyo dari Indramayu, pemenang kedua Richad Ghadi, dan, pemenang pertama Wahyu Siswanto dari Lumajang, Jawa Timur.

Kategori lomba *meme* pemenangnya dipilih karena pesannya sangat kuat. Para pemenang membuat *meme* atau karikatur yang memperlihatkan, bahwa sebetulnya dalam *meme* tersebut ada sadungan kritiknya untuk DPR RI.

Dari kategori *stand up comedy*, *meme*, dan esai tersebut, dipilih pemenang *best of the best*. Setelah para juri berembuk, terpilihlah komika Aji Pratama dari Palembang sebagai *best of the best* dari keseluruhan lomba “Kritik DPR”, dan berhak mendapatkan hadiah sepeda motor Vespa. ■ eko/sf



Foto: Runit/hr

Prosesi Pimpinan DPR RI membuka pameran seni rupa dengan menggunting pita

Pimpinan DPR Buka Pameran Foto dan Pameran Seni Rupa

Wartawan Foto Parlemen yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI menggelar Pameran Foto Warna-Warni Parlemen ke 7 Tahun 2018. Pameran yang mengangkat tema 'DPR Zaman Now' ini masuk dalam rangkaian peringatan HUT ke-73 DPR RI.

Pameran yang memperlihatkan 101 buah karya para wartawan ini dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dengan didampingi beberapa Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, serta pejabat di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI itu diselenggarakan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Kepada wartawan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh fotografer dan wartawan yang hadir dengan menyatakan 'Maju Terus pantang Mundur'.

Usai meninjau Pameran Foto, Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu bersama Pimpinan dan Anggota DPR RI meninjau Pameran Seni Rupa dengan tema "Kepada Republik #4" yang juga diselenggarakan di pelataran Gedung DPR RI. Turut hadir para duta besar

negara-negara sahabat, seperti Sudan, Rusia, Yaman, Afganistan, Maroko, Pakistan, Venezuela, Finlandia, dan lain-lain.

Disela-sela peninjauan pameran seni rupa, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan parlemen sebagai rumah rakyat perlu menyediakan *art space* (ruang seni) bagi para seniman sebagai bentuk apresiasi atas hasil karya seni anak bangsa. Apalagi, seni dan politik kerap tak bisa dipisahkan. Menurutnya, menyikapi perbedaan politik dengan wajar dan cerdas merupakan bagian dari ekspresi seni pula.

"Sejak awal pembangunan gedung DPR ini banyak karya para seniman, terutama dari seni rupa ITB. Kita ingin DPR juga jadi *art space*. Semua seniman bisa berpameran di sini, sehingga ada apresiasi. Pameran ini sudah kita lakukan selama empat tahun secara berturut-turut," jelas Fadli. ■ mh,dep/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah, Geraldii Opie

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Garda Terdepan Jaga Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga negara menjadi garda terdepan dalam merawat dan menjaga rumah bersama bernama Indonesia dengan penyangga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, politik-kebangsaan merupakan ruh, nyawa, obor, dan energi positif DPR RI untuk menjaga negara-bangsa Indonesia dari segala macam tantangan, gangguan, dan ancaman, baik yang bersifat domestik maupun global.

“Semangat tersebut kita terus tanamkan kepada segenap komponen bangsa, terutama generasi milenial, melalui pelbagai bentuk media sebagai upaya mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara utuh, sesuai amanah konstitusi. Dengan demikian, DPR RI selalu tampil di depan dalam membendung arus politik-ideologi apa pun yang bisa merongrong dan mengancam nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan bangsa yang kita cintai ini,” kata Ketua DPR RI dalam Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2017-2018 pada Rapat Paripurna perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI mengatakan, di usia ke-73 ini, DPR RI harus lebih produktif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan amanah rakyat di bidang legislasi, selama Tahun Sidang 2017-2018, DPR RI telah berhasil menyelesaikan 17 tujuh belas undang-undang (UU). Sehingga semua UU yang disetujui selama Periode 2014-2019 sebanyak 62 UU. Harus diakui, kinerja di bidang legislasi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, Pimpinan tidak henti-hentinya mengajak semua fraksi, komisi, badan dan seluruh anggota DPR RI untuk bekerja keras menuntaskan rancangan undang-undang yang sudah disepakati dalam Prolegnas.

“Pimpinan DPR RI bersama pimpinan Fraksi-fraksi terus berikhtiar untuk mencari jalan terhadap pembahasan RUU yang macet dan berlarut-larut, ada yang dua tahun, satu tahun dan berkali-kali masa sidang. Alhamdulillah, hasilnya cukup menggembirakan. Pada masa sidang yang lalu, kita berhasil menetapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama

2 tahun, menjadi Undang-undang. Kita juga bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHP, sebagai hadiah terbesar DPR RI periode ini untuk bangsa dan negara,” harap politisi Partai Golkar itu.

Meskipun demikian, jelas Bamsoet, kinerja fungsi legislasi tidak hanya diukur dari jumlah UU yang dihasilkan. Fungsi legislasi merupakan suatu rangkaian proses yang panjang, mulai dari penyusunan rancangan undang-undang (RUU), pembahasan RUU bersama dengan Presiden atau Pemerintah, hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden. Kinerja legislasi DPR RI tidak berdiri sendiri, karena sesuai konstitusi, setiap RUU dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

“Dalam pembahasan RUU kerap terjadi perbedaan pendapat yang mendasar, antara fraksi-fraksi DPR dengan Pemerintah, bahkan antar wakil pemerintah yang mendapat mandat Presiden untuk membahas RUU bersama dengan DPR RI. Meskipun pengambilan keputusan dengan suara terbanyak merupakan keniscayaan dalam demokrasi, namun hal itu menjadi pilihan akhir, karena kita lebih mengedepankan semangat musyawarah mufakat. Dengan menempuh jalan ini proses yang ditempuh lebih panjang dalam penyelesaian RUU. Tetapi itu semua untuk kebaikan bersama sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dan implementatif,” papar Bamsoet.

Selama Tahun Sidang 2017-2018, melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran, DPR RI telah menjalankan fungsi anggaran dengan baik dan efektif. Sesuai dengan siklus anggaran, pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dan

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 telah diselesaikan oleh DPR RI. DPR RI dan pemerintah juga telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan perkembangan global maupun domestik, agar penyusunan RAPBN Tahun 2019 lebih realistis dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Anggaran untuk daerah dan desa terus ditingkatkan, pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan terus kita prioritaskan. Anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan terus dipertajam sasarannya serta dimantapkan kualitasnya. Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan guna menyatukan Indonesia terus diberikan perhatian. Demikian pula, anggaran swasembada pangan, reforma agraria, dan sertifikat gratis untuk rakyat terus ditambah dan ditingkatkan,” papar Bamsoet.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI membentuk Panitia Khusus Non-RUU dan Panitia Kerja (Panja) serta TIM Khusus untuk merespon berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat. Lebih daripada itu, DPR RI juga memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat negara dan pejabat publik lainnya. Selama Tahun Sidang 2017-2018 terdapat dua Pansus sebagai kelanjutan dari tahun sidang sebelumnya. Pansus tersebut adalah Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II dan Pansus tentang Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK.

Selain itu, terdapat tujuh Tim yang dibentuk Pimpinan DPR RI, yaitu: (1) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; (2) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; (3) Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (5) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (6) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan;



Foto: Anchi/hr

Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPD RI dan para mantan Ketua DPR RI berfoto bersama usai pemotongan tumpeng HUT ke-73 DPR RI

dan (7) Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Keberadaan Tim pengawasan itu dimaksudkan agar secara konsisten ada pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah maupun di kalangan internal DPR RI sendiri, guna memastikan kemanfaatan dari kebijakan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada tahun sidang ini, juga dibentuk 41 Panitia Kerja (Panja), khususnya Panja Komisi, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan. Kinerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam seleksi pengangkatan pejabat publik,” imbuh Bamsuet.

Perkuat politik Luar Negeri dengan Fungsi Diplomasi

Untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia, DPR RI memiliki fungsi diplomasi yang dilaksanakan melalui partisipasi dalam sidang-sidang regional dan internasional, baik antar-parlemen maupun non-parlemen, serta melalui hubungan bilateral dan individual. Di fora antar-parlemen, utamanya dilakukan melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan Inter-Parliamentary Union (IPU). Diplomasi

parlemen juga dilakukan di forum *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, *MIKTA Speakers’ Consultation*, *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*, dan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership*, serta di forum *Women Political Leaders (WPL)*.

“Dalam perjalanan menata kelembagaan, DPR selalu berusaha untuk mendekati diri kepada masyarakat. Untuk itu, DPR RI sudah memulai program parlemen modern sejak 2015 hingga sekarang. Sejumlah capaian telah berhasil dilalui, akan tetapi konektivitas DPR dengan masyarakat yang menjadi konstituen masih perlu ditingkatkan, guna mendorong partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan target *audience* yang lebih luas, dengan memanfaatkan teknologi informasi,” kata politisi dapil Jawa Tengah itu.

Inisiatif *Open Parliament* melengkapi dan memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR. Dengan adanya *Open Parliament*, inisiatif kolaborasi dan partisipasi masyarakat di DPR semakin terbuka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan representasi masyarakat. Kehadiran DPR pada dua forum *Global Legislative Openness Conference* di Ukraina pada April 2017 dan *Open Government Summit* di Georgia pada Juli 2018 merupakan bentuk komitmen parlemen dalam

mendorong keterbukaan informasi publik.

“Oleh karena itu, pada tahun ini, bertepatan dengan HUT DPR RI, diluncurkan Aplikasi DPR RI dalam Genggaman Rakyat. Saya menyebutnya dengan *DPR Zaman Now*. Cukup dengan menekan layar *smartphone*, masyarakat dapat mengakses seluruh kegiatan DPR RI. Dengan aplikasi ini, diharapkan jarak antara DPR RI dengan masyarakat akan semakin dekat. DPR RI dapat diakses setiap saat oleh masyarakat, tidak terikat kepada jarak dan waktu. Di satu sisi, masyarakat akan memperoleh informasi terkini tentang DPR RI. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya setiap saat kepada DPR RI,” jelas Bamsuet.

Rapat Paripurna yang juga dihadiri Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPD RI, mantan Pimpinan DPR RI, dan sejumlah mantan Sekretaris Jenderal DPR RI itu diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Pimpinan DPR RI, disaksikan oleh Anggota DPR RI. Rangkaian acara dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi “DPR Now! DPR dalam Genggaman Rakyat”, deklarasi *Open Parliament*, Pameran Museum DPR RI, Pameran Foto Warna-Warni Parlemen; Pameran Seni Rupa dengan tema “Kepada Republik #4”, Donor Darah, final lomba *stand up comedy*, meme, dan esai “Kritik DPR”, Refleksi Hari Lahir DPR bersama Kyai Kanjeng, Lomba Panjat Bambu Betung; dan Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat. ■ tim/sf

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kuota Impor Gula Mentah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan izin impor gula mentah (raw sugar) untuk sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 111 ribu ton yang diperkirakan akan masuk pada bulan September 2018 mendatang. Dari tujuh perusahaan BUMN yang rencananya mendapatkan jatah impor gula, terdapat lima perusahaan yang sudah mengantongi izin dari Kemendag.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah untuk memperhatikan kuota impor gula mentah itu. Menurutnya, impor dapat dilakukan jika memang hasil produksi dan kebutuhan konsumsi belum sebanding. Namun bukan berarti seluruh kebutuhan gula mentah dipenuhi dari impor. Penyerapan gula dari petani lokal harus dimaksimalkan, dan aturan untuk membatasi kuota impor harus diberlakukan.

"Impor gula sebanyak 111 ribu ton itu kan sangat banyak. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan impor ini diambil setelah seluruh produksi gula petani lokal terserap maksimal? Jangan sampai sedang ada panen tebu, kebijakan impor diberlakukan, lalu gula dari petani lokal malah tidak terserap, dalam kaitan semua kebutuhan sudah terpenuhi oleh gula impor. Kuota impor itu harus menjadi perhatian," kata Taufik dalam rilis pers yang diterima Parlemen, Kamis (30/8).

Taufik menilai, jika impor dilakukan di tengah masa panen tebu milik petani dalam negeri, imbasnya harga gula petani akan anjlok. Ia pun yakin, jika gula impor itu beredar untuk konsumsi, maka gula hasil dari petani lokal tidak mampu bersaing. Imbasnya, petani juga yang akan merugi dan semakin terhimpit.

"Kalau impor dilakukan di masa panen, atau ketika gula dari petani lokal belum terserap, sama saja itu membunuh petani kita. Mereka tidak akan mampu bersaing dengan gula impor. Jika tujuan impor itu untuk stabilisasi harga, harus dipastikan gula dari petani lokal sudah terserap maksimal," tandas politisi PAN itu.

Diketahui, lima perusahaan yang sudah mendapatkan izin diantaranya Perum Bulog melalui anak usahanya Gendhis Multi Manis. Selain itu ada juga PT Perkebunan Nusantara IX, Pabrik Gula Candi Baru, Pabrik Gula Rajawali I dan Pabrik Gula Rajawali II. Sementara itu dua perusahaan lainnya yakni PTPN X dan PTPN XII belum mengantongi izin lantaran masih mengurus berbagai syarat kelengkapan. ■ es/sf

DPR RI sepenuhnya mendukung Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan untuk membuat langkah konkret dalam meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara. Mengingat, Korea Selatan adalah investor asing terbesar ketiga di Indonesia, yaitu sekitar 9600 dollar AS pada kuartal pertama di tahun 2018.

“Korea Selatan merupakan negara yang strategis untuk bekerjasama di bidang bioenergi, industri perdagangan dan alat pertahanan,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin kunjungan muhibah DPR RI ke Korea Selatan. Delegasi DPR RI diterima langsung oleh Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea Joo Seung Yong di National Assembly, Ulsdang-Daero, Yeongdeungpo, Seoul, Korea Selatan, Selasa (23/8).

Agus menambahkan, kedua pemerintahan baru ini sepakat meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi transportasi industrialisasi dan pertahanan melalui perjanjian kemitraan strategis khusus yang ditingkatkan melalui kerjasama dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In di Kota Bogor, November 2017 lalu. Presiden Jokowi dan Moon Jae sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral sebesar 30 miliar dolar AS pada 2022.

Di bidang pertahanan, DPR RI telah menyetujui ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Menurut Agus, perjanjian tersebut meliputi perluasan pertukaran personel, pertukaran material dan peralatan antar-militer Korea Selatan dan Indonesia, sekaligus membentuk komite kerja sama untuk menangani kegiatan tersebut.

“Persetujuan tersebut akan menjadi landasan bagi peningkatan kerja sama kedua negara dalam proyek pengembangan jet tempur generasi selanjutnya, KF-X dan IF-X,” imbuh politisi Partai Demokrat itu, yang juga menjadi pimpinan pada Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui ratifikasi perjanjian kerja sama itu, Juli lalu.

Foto: Rumi/hr

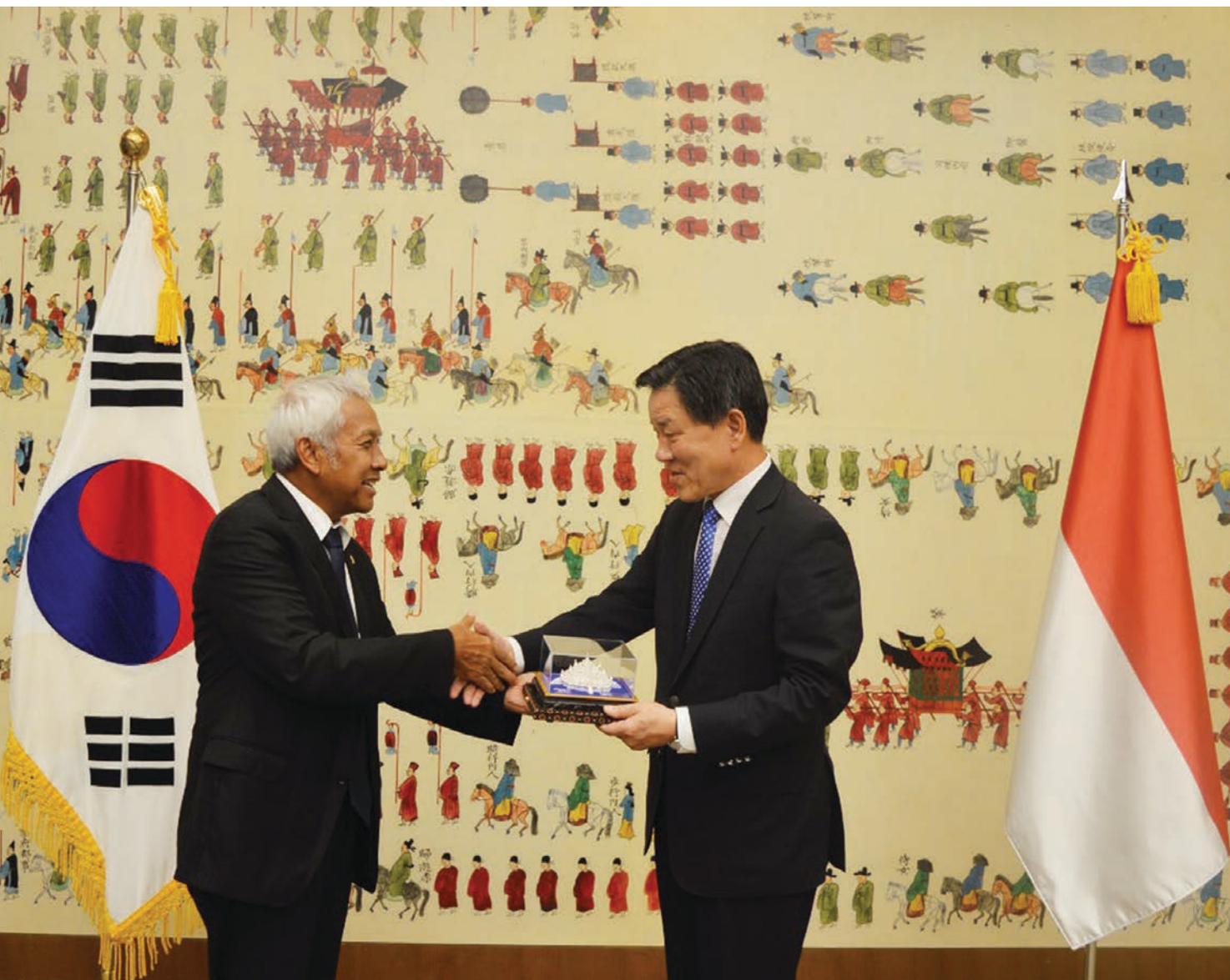


Foto: Dok/hr

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertukar cenderamata bersama Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea di National Assembly, Seoul, Korea Selatan

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Korsel

Sebagai tuan rumah, Joo Seung Yong menyambut baik kehadiran delegasi Indonesia. Joo Seung Yong juga mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah Penyelenggara Asian Games.

Kepada delegasi DPR RI, Joo Seung Yong menyampaikan besar harapannya hubungan kerja sama dengan Indonesia terus ditingkatkan, terutama di sektor perdagangan dan industri.

Turut serta dalam kunjungan muhibah itu, diantaranya Wakil Ketua

Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha (F-PG), Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-NasDem), dan Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan).

Kemudian Anggota Komisi VI DPR RI Nasir Bahar (F-PAN), Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar (F-PD), Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Afsal Mahfudz (F-PD), dan Anggota Komisi III DPR RI Sayed Abubakar Assegaf (F-PD). ■ ann/sf

Korea Selatan merupakan negara yang strategis untuk bekerjasama di bidang bioenergi, industri perdagangan dan alat pertahanan

Fraksi DPR Sampaikan Pandangan Umum Atas RAPBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa terhadap RUU APBN serta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud Ayat 1, Fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.



Foto: Andri/7hr

Pimpinan DPR RI bersalaman dengan Menteri Keuangan RI dan Wakil Menkeu usai Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8) itu mempersilakan juru bicara dari masing-masing Fraksi untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara bergiliran. Turut mendampingi Fadli, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Kondisi global saat ini yang tidak menentu, dimana perekonomian beberapa negara besar yang menjadi kiblat dalam sistem dan perekonomian mengalami guncangan hebat menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan). Juru bicara F-PDI Perjuangan MY Esti Wijayati mengatakan, pemerintah dinilai perlu meningkatkan kinerja agar tidak terseret pada arus putaran yang kurang baik tersebut.

“Baru-baru ini, kita melihat negara

yang pemimpinnya yang banyak dieludukan oleh banyak pihak, Turki, mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat. Sehingga terjadi defisiensi mata uang hingga 67 persen, inflasi di atas 15 persen, serta defisit neraca 7,88 persen,” kata Anggota Komisi X DPR RI itu.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) menilai, penyusunan RAPBN 2019 kali ini diwarnai dengan terjadinya gejala perekonomian global yang sudah berdampak pada perekonomian nasional. Juru bicara F-PG Salim Fakhry mengatakan, penyusunan RAPBN 2019 harus dilakukan dengan bersama, guna menghasilkan program tepat sasaran dan tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun harapan rakyat agar pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sampai tahun ke-5 atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, juga masih jauh dari janji

“Kebijakan normalisasi perekonomian serta perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat memberikan dampak kepada mata uang di berbagai kawasan, tak terkecuali di Indonesia. Trend pelemahan ini tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus menyikapi dengan serius, dan mencari solusi dengan seksama dan mencari langkah perbaikan yang efektif dan efisien,” kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra) menilai, mimpi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin mencapai angka pertumbuhan ekonomi 7 persen, ternyata masih jauh dari harapan. Hingga mendekati akhir pemerintahannya,

angka pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5 persen. Juru bicara F-Gerindra Ramson Siagian menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

“Namun harapan rakyat agar pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sampai tahun ke-5 atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, juga masih jauh dari janji pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut,” kata Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Berikutnya, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI mengharapkan pergerakan harga minyak dunia perlu diantisipasi, karena akan berdampak pada kebijakan energi dalam negeri dan fiskal. Kasus Venezuela yang mengalami kelangkaan mata uang asing, namun ketidakmampuan negara itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri, mengakibatkan negara kaya minyak yang ambruk dalam perekonomian perlu menjadi perhatian kita bersama.

Juru bicara F-PD Muhammad Afzal Mahfuz menekankan agar berbagai kendala tingkat domestik harus segera dicari solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemandirian ekonomi yang rendah, tidak bisa memproduksi barang, jumlah produksi terbatas ditambah sanksi dan salah urus seperti mencetak mata uang hingga berimbas terjadi inflasi tinggi ribuan persen di Venezuela telah melebihi krisis moneter Indonesia pada tahun 1998.

“Pengalaman krisis moneter tahun 1998 harus menjadi pelajaran pemerintah, termasuk kejadian di Venezuela,” tandas Anggota Komisi II DPR RI itu.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) memberi catatan atas defisit anggaran pada RAPBN 2019 sebesar Rp297,163 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Juru bicara F-PAN Ahmad Yohan mengatakan, angka ini turun apabila dibanding sebelumnya yang berada pada kisaran 2,12 persen.

“Di satu sisi penurunan defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan fiskal secara lebih hati-hati dan bertanggungjawab. Namun di sisi lain, keberadaan defisit anggaran ini juga menandakan bahwa penyusunan RAPBN 2019 masih belum berimbang.

Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih hati-hati dalam target penerimaan sekaligus berhati-hati dalam menyusun dalam belanja negara,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI menaruh harapan agar APBN 2019 tetap memiliki spirit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini perlu diingat bahwa 2019 adalah tahun politik, tepat berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara bersamaan. Sehingga diharapkan fokus pemerintah tidak terpecah akibat pesta demokrasi tersebut.

Kami cermati pengelolaan fiskal makro ekonomi tahun mendatang masih menghadapi tantangan berat. Perekonomian domestik rentan dipengaruhi faktor eksternal yang disebabkan kebijakan bank central AS

“APBN 2019 harus dilandasi spirit kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa tahun 2019 adalah tahun terakhir dari RPJMN untuk periode 2015-2019. F-PKB memandang, pelaksanaan APBN 2019 wajib hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia,” ungkap juru bicara F-PKB DPR RI Siti Musrifah yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) memaparkan, beberapa tahun terakhir ini, Indonesia masih dihantui oleh persoalan ekonomi fundamental, seperti angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan. Juru bicara F-PKS Adang Sudrajat menekankan, fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera merubah fundamental ekonomi nasional menjadi kelas menengah atas.

“Memasuki 73 tahun kemerdekaan dan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental, terkait pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Jumlah rakyat menganggur mencapai 6,87 juta jiwa. Jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin masih sangat tinggi, masing-masing 25,9 juta jiwa dan 96,8 juta jiwa,” kata Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menilai, APBN 2019 masih akan mengalami tantangan berat. Terutama yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga pemerintah diharapkan mampu waspada menghadapi tantangan ini agar perekonomian domestik tetap *survive*.

“Kami cermati pengelolaan fiskal makro ekonomi tahun mendatang masih menghadapi tantangan berat. Perekonomian domestik rentang dipengaruhi faktor eksternal yang disebabkan kebijakan bank *central AS*,” ungkap juru bicara F-PPP Abubakar Wasahua yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Fraksi Partai NasDem (F-NasDem) menilai tema “APBN 2019 untuk mendukung investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM)” merupakan tema yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, dimana pemerintah dan Kabinet Kerja pada tahun ke-4 sedang dalam proses menyelesaikan pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial.

“Untuk merealisasikan tema tersebut dibutuhkan kerja keras serta sinergi dari semua *stakeholder*, termasuk dukungan penuh dari DPR. F-NasDem menghargai jerih payah pemerintah yang telah berhasil membangun berbagai infrastruktur yang mampu menjamin konektivitas guna mendukung kemajuan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian, serta pengurangan ketimpangan pembangunan,” ungkap juru bicara F-NasDem Ahmad Sahroni yang juga Anggota Komisi III DPR RI itu.

Fraksi Partai Hanura (F-Hanura) mendorong APBN 2019 harus memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. F-Hanura berpandangan APBN 2019 ditekankan pada kualitas produk dan prioritas, antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja.

“Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2019 mengalami kenaikan dari sebelumnya. Penting bagi pemerintah memperhatikan yang berbasis pada pemerataan, serta pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. F-Hanura berharap pemerintah meningkatkan koordinasi dalam menjaga pengelolaan fiskal yang berkelanjutan untuk menjaga inflasi sesuai target RAPBN 2019,” kata juru bicara F-Hanura Zairina. ■ *tim/sf*

RUU Perlindungan Data Pribadi Wajib Diprioritaskan

Banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi seperti kasus kebocoran data pengguna di media sosial maupun penipuan telepon masuk dari luar negeri membuat kebutuhan regulasi terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat mendesak dan harus segera dikaji.



Foto: Azka/hr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

mengupayakan hal ini.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa betul-betul mewujudkan atau menjadi keprihatinan bersama yang memaksa pemerintah untuk segera mengusulkan RUU PDP. Karena kalau itu kita masukkan sebagai inisiatif DPR RI, tentunya pasti tidak akan memungkinkan untuk bisa selesai pada periode ini. Tapi kalau ini inisiatif dari pemerintah, terobosan dan persiapan bahan akan lebih matang,” pungkasnya.

■ eps/sf

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengaku bahwa sesungguhnya DPR RI telah meminta langsung pemerintah untuk mengajukan usulan memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Prolegnas Prioritas tahunan.

“Jadi ada dua keluhan. Yang pertama adalah Facebook dan kedua adalah seperti yang kita ketahui laporan dari Polda Metro Jaya. Dari situ, Komisi I DPR RI jelas meminta kepada pemerintah untuk secara pro aktif untuk segera mengajukan usulan atau draf RUU mengenai Perlindungan Data Pribadi ini segera dimasukkan untuk menjadi prioritas tahunan,” jelasnya saat Diskusi Forum Legislasi bertajuk “Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Namun, lanjut politisi Partai Golkar itu, hingga saat ini pihak pemerintah menurutnya bahkan belum berhasil memasukkan RUU PDP menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2018. Untuk itu ia mendesak pemerintah untuk bernegosiasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Jadi beberapa waktu yang lalu kenapa mereka gagal, Menkominfo menceritakan pada saya bahwa sudah melebihi kuota, sehingga dia tidak bisa di prioritaskan pada tahun 2018 awal. Maka kita meminta kepada Menkominfo untuk segera bernegosiasi dengan Baleg untuk supaya bisa diprioritaskan,” tuturnya.

Politisi dapil Jatim IX ini berharap agar pemerintah berinisiatif untuk menyelesaikan RUU PDP ini untuk menjadi prioritas, karena Komisi I DPR RI sendiri telah berusaha semaksimal mungkin untuk

Legislator Harapkan Keseragaman Tafsiran PKPU Hingga Ke Daerah



Foto: Jaka/hr

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo

“Ini kelihatannya teman-teman di daerah, apakah mereka ini baru dilantik sehingga pemahaman yang masih berbeda-beda,” ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo berharap agar Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan sosialisasi ke tingkat daerah guna menyeragamkan penafsiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke seluruh wilayah Indonesia.

Firman mencontohkan saat ia berkeliling mengunjungi empat kabupaten yang ada di dapilnya. Saat itu ia juga mengundang KPUD dan Panwaslu sembari menanyakan apakah dibolehkan memasang balih dengan menampilkan foto seluruh calon legislatif (caleg) di halaman sekretariat partainya itu sendiri.

Politisi Partai Golkar ini mendapat jawaban yang berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang menganggap hal itu tidak boleh dilakukan. Padahal itu dilakukan agar masyarakat itu memahami dan tahu siapa saja calon legislatif dari Partai Golkar yang akan dicalonkan.

“Sebetulnya ini kan cukup bagus, karena memberikan pembelajaran politik

dan sosialisasi kepada publik. Ini kan bukan di halaman umum ini ada di halaman sekretariat partai masing-masing,” tambah Firman.

Firman menganggap hal tersebut merupakan bagian dari citra diri. Ia berharap ada persamaan penafsiran antara DPR RI, Partai Politik, KPU dan juga Bawaslu. Karena ini dilakukan bukan di halaman umum melainkan di halaman sekretariat partai.

“Agar menjadi perhatian dan mohon diseragamkan terhadap masalah yang terkait dengan alat peraga ini. Saya mohon kepada KPU dan Bawaslu, kalau itu masih di dalam halaman partai politik atau sekretariat partai politik, sekiranya diizinkan saja,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah ini. ■ es/sf

DPR Upayakan Beri Penghargaan Kepada Atlet Berprestasi Asian Games

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengapresiasi perolehan medali Indonesia dalam Asian Games 2018 yang telah melampaui target. Ia pun mendorong agar negara hadir dalam memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi dalam kegiatan Asian Games. DPR RI sebagai wakil rakyat harus memiliki andil dalam memberikan penghargaan kepada para atlet yang berhasil mendulang medali emas khususnya.



Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait

Foto: Ojji/hr

“Kami senang karena Indonesia di Asian Games bisa melampaui target dan itu berkat kerja sama semua. Termasuk Pimpinan dan Anggota DPR RI yang mendukung kebijakan guna tercapainya melebihi target. Ini kebanggaan bagi kita semua. Kita butuh kemenangan, apapun partainya, tidak bisa diklaim satu parpol. Semua parpol membantu kemenangan atlet,” ungkap Maruarar saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Politisi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, jika Pimpinan DPR RI secara khusus memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi Asian Games ini, maka ini

menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara. Sehingga dengan raihan medali emas di Asian Games ini mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia.

“Saya harap Pimpinan DPR RI, bagus jika Pimpinan DPR RI setuju kita beri perhatian yang luar biasa dengan prestasi yang luar biasa juga. Jadi bisa memberi semangat bagi atlet yang sudah kerja keras mencapai target medali,” ungkap politisi dapil Jawa Barat itu.

Diketahui, sebelumnya pemerintah memasang target di Asian Games 2018 dengan menempati posisi 10 besar dan meraih 20 medali emas. Hingga saat ini, Asian Games 2018 belum berakhir namun target sudah tercapai. Per 27 Agustus 2018, Indonesia berada di peringkat 4 dengan 22 medali emas, 15 perak, dan 27 perunggu. Indonesia pun masih bisa menambah medali hingga Asian Games berakhir pada 2 September 2018. ■ hs/sf

Pasal Penodaan Agama Harus Diperbaiki

Melihat semakin banyaknya laporan terkait kasus penodaan agama yang terjadi dan banyaknya polemik di publik terkait Pasal Penodaan Agama pada KUHP, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan pasal tersebut tidak boleh dihapus, namun harus diperbaiki bersama. Hal ini diutarakan olehnya karena ada pihak atau lembaga masyarakat yang coba mengusahakan dihapusnya pasal tersebut.

sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai akan lebih banyak lagi permasalahan akibat penodaan agama apabila pasal ini dicoba dihapuskan. Menurutnya, akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan bahkan menentukan jalan hukumnya sendiri.

“Sebaiknya diajukan rumusan kembali dibanding menghapusnya. Ini harus tetap ada, apalagi jelang tahun politik. Kalau pasal ini coba dihapuskan, akan ada elemen masyarakat yang mengambil jalan hukumnya sendiri. Maka nanti munculah *dark justice*,” terang politisi dapil Jateng itu.

Sebagaimana diketahui, putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai, Sumatera Utara dengan terdakwa Meilina yang divonis 1,5 tahun penjara menuai polemik di publik, bahkan muncul pro kontra. Meilina terbukti menodai agama terkait keberatan terdakwa atas kerasnya suara adzan yang berujung pembakaran dan perusakan vihara dan klenteng di wilayah tempat tinggalnya. ■ eps/sf

Alasannya adalah bahwa sensitivitas pemeluk agama di Indonesia saat ini siklusnya meningkat dengan rentetan masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kemudian memasuki tahun politik juga, penting untuk mengantisipasi politisasi terhadap agama.

“Dengan adanya kasus penodaan agama seperti di Tanjung Balai, kemudian digunakan untuk kampanye beberapa teman LSM untuk menghapuskan pasal pidana tentang penodaan atau penghinaan terhadap agama,” tuturnya saat ditemui



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Foto: Arief/hr

Pelaut Minta Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Pelayaran

Sejumlah pelaut yang tergabung dalam Ikatan Korps Perwira Pelayaran Negara Indonesia (IKPPNI) mengkritisi tata kelola pelayaran Tanah Air. Mereka mengkritisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, hingga kurangnya sumber daya manusia (SDM) maritim yang terlibat langsung dalam tata kelola pelayaran di tanah air.

Demikian mengemuka dalam audiensi Komisi V DPR RI dengan IKPPNI yang dibuka dengan pemberian petisi terkait tata kelola dan keselamatan pelayaran niaga Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Audiensi diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno dan Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing.

“Mereka membuat petisi tentang ketidakpercayaannya terhadap tata kelola di Kementerian Perhubungan. Bayangkan terdapat 16 ribu PNS di Kemenhub, namun hanya 400 orang yang berlatar belakang tenaga kelautan ataupun kemaritiman,” ungkap Anthon, yang juga pernah berprofesi sebagai pelaut, usai pertemuan.

Anthon menuturkan, selama ini Kemenhub belum mengoptimalkan

potensi SDM berbasis kemaritiman yang ada. “Terlihat dari masih banyak tenaga kerja atau pemimpin di Ditjen Hubla yang justru memiliki kompetensi berbeda atau dari jurusan lain,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut Anthon, berbagai kecelakaan transportasi laut tidak dapat dihindarkan. Menurutnya, faktor cuaca bukanlah hal yang mutlak untuk dijadikan alasan, sebab kecelakaan tidak luput dari hal teknis mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan.

“Seperti bagaimana kemampuan orang-orang di pelabuhan melepaskan kapal dan bagaimana kemampuan orang yang membawa kapal,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Ketua Umum IKPPNI Dwiyono Soeyono mengatakan Indonesia membutuhkan intelektualitas tata kelola pelayaran niaga yang berkualitas dan

menjamin keselamatan jiwa, harta benda dan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, ia menilai, kondisi saat ini sangat jauh dari ideal. Data korban jiwa akibat kecelakaan pelayaran niaga sampai akhir Juli 2018 sudah lebih dari 250 korban, sementara tahun-tahun sebelumnya jumlah korban pun selalu diatas angka 100 jiwa.

“Untuk meningkatkan keselamatan dalam pelayaran niaga, kami sebagai warga negara dan tenaga ahli pelayaran niaga dari Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) yang selalu berperan aktif dan peduli dengan ini menyampaikan petisi kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui Komisi V DPR RI,” ungkap Dwiyono.

Dalam kesempatan itu juga dibacakan 4 poin petisi meliputi SDM maritim, ketenagakerjaan pelaut, penertiban ASN serta diadakannya peradilan Maritim, pembentukan Badan Keselamatan Pelayaran Niaga yang bersifat independen, serta revisi UU terkait pelayaran niaga yang tumpang tindih.

Dalam petisi yang diberikan, IKPPNI meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja di lingkungan

Kemenhub. Ia mengatakan, sejumlah kecelakaan moda transportasi laut tidak terlepas dari gagalnya kinerja Kemenhub dalam menjaga dan mengawasi aspek keselamatan penumpang angkutan laut.

Menurutnya, Kemenhub perlu menempatkan orang-orang yang ahlinya atau berkompeten dalam tata kelola keselamatan pelayaran niaga, bukannya didelegasikan kepada profesi lain yang memiliki kompetensi berbeda. Sebab, secara teknis hal tersebut penting untuk memastikan keselamatan pengguna jasa angkutan air di Indonesia. ■ ann/sf



Foto: Jay/hr

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing berdialog dengan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Negara Indonesia (IKPPNI)



Foto: Ayu/hr

Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba, Sumut

Kebijakan Zero Keramba di Danau Toba Harus Pikirkan Nasib Masyarakat Sekitar

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan mengapresiasi perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang beberapa kali mengunjungi kawasan Danau Toba di Sumatera Utara. Begitupun dengan rencana pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Namun, rencana itu tidak diikuti dengan kebijakan lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat sekitar.

Saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Danau Toba, Sumut, Kamis (23/8), ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata yang *zero* (nol) keramba. Pasalnya selama puluhan tahun sebagian besar masyarakat Danau Toba menggantungkan kehidupan sebagai nelayan Keramba Jaring Apung (KJA). Artinya kebijakan *zero* keramba tersebut nantinya akan berpengaruh mematikan penghasilan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Terkait adanya dugaan KJA menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan, politisi dari Fraksi Partai

Gerindra ini membenarkan memang telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan (air) di Danau Toba. Namun apakah itu disebabkan oleh KJA milik masyarakat atau bukan, mengingat ada beberapa perusahaan besar seperti PT. Aquafarm Nusantara yang membuat KJA dengan jumlah yang sangat banyak dan besar.

“Saya sangat familiar dengan Danau Toba. Jadi kalau dikatakan ada tidaknya pencemaran air atau lingkungan di Danau Toba, saya meyakini bahwa itu benar ada pencemaran. Terbukti dengan warna air yang sudah tidak sejernih sebelumnya. Bahkan debit air pun menurun jauh. Tapi apakah itu disebabkan KJA yang dimiliki

masyarakat atau karena perusahaan besar yang membuat KJA dengan jumlah yang sangat banyak dan besar seperti PT Aquafarm yang hari ini juga kita kunjungi,” papar putra asli Sumut itu.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat riset atau penelitian secara berkala untuk mengevaluasi dugaan pencemaran lingkungan Danau Toba. Termasuk dugaan ikut andilnya PT. Aquafarm dengan KJA-nya dalam proses pencemaran dan kerusakan lingkungan di Danau Toba. “Saya berharap LHK melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat Danau Toba bagaimana membuat KJA yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Untuk diketahui pada tahun 2013 silam, dalam periode sebelumnya Komisi VII DPR RI sempat merekomendasikan KLHK untuk mencabut izin perusahaan asal Swiss tersebut dari Danau Toba. Namun sampai saat ini, perusahaan tersebut masih beroperasi. Meski demikian, kali ini Komisi VII DPR RI meminta KLHK untuk melakukan penelitian secara berkala terhadap kondisi air atau lingkungan di Danau Toba. Serta mencari solusi terhadap hasil riset tersebut nantinya.

“Kalau langsung dicabut izin PT. Aquafarm, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Ini juga harus dipikirkan. Namun itu bukan berarti Aquafarm dapat terus beroperasi dengan tidak mepedulikan lingkungan atau terus melakukan pencemaran (jika itu nanti terbukti). Kami akan mendorong KLHK untuk segera melakukan riset dan melaporkan hasilnya untuk dicarikan solusi bersama. Yang jelas pencemaran lingkungan harus dihentikan,” tegas Gus Irawan.

Hal tersebut pun diamini oleh Anggota Tim Kunspek Komisi VII DPR RI lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Nasir, Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez, dan Katherine A. Oendoen. ■
ayu/sf

Kalau langsung dicabut izin PT. Aquafarm, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut

PMN Harus Bermanfaat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengajukan dan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) harus bekerja semaksimal mungkin, agar bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pemerintah sudah mengusulkan perusahaan yang akan menerima PMN lagi dan kita tidak mau dana ini menjadi tidak bermanfaat, jadi harus ditanyakan dulu yang belum terpakai masalahnya dimana. Karena kami dapat laporan dari beberapa BUMN masalahnya itu di perizinan dan perencanaan yang berubah-ubah,” papar Hekal dalam Rapat Panja PMN dengan Sekretaris Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Politisi Gerindra ini mengatakan, setiap perusahaan BUMN yang sudah mengajukan dan menerima PMN harus siap dalam memaksimalkan dana yang sudah didapat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Perusahaan BUMN yang mengajukan



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal

Foto: Ojji/hr

dan menerima PMN harus siap eksekusi, karena uang ini kan kalau sampai hari ini masih ada yang 50 persen atau 0,4 persen dan bahkan 0 persen. Berarti uang itu kan diam direkening saja dan ini tidak bermanfaat bagi siapa-siapa,” paparnya.

Politisi dapil Jawa Tengah ini mengharapkan agar dana yang diberikan pemerintah kepada perusahaan BUMN melalui persetujuan DPR RI memiliki efektifitas dan jangkauan yang jauh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perusahaan BUMN yang sudah mengajukan dan menerima PMN harus siap dalam memaksimalkan dana yang sudah didapat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Kita tidak mau membuat kesalahan. Misalnya ada PMN kita berikan, tetapi dananya masih diam di perusahaan dengan alasan yang bermacam-macam. Sehingga dana yang diberikan menjadi percuma, karena dana ini lagi susah terkait kurs kita yang terus melemah dan berbagai masalah lainnya,” imbuhnya. ■ tn/sf

Putu Supadma Dorong Eksistensi Museum di Era Digitalisasi

Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana menyambut baik seminar nasional bertajuk “Optimalisasi Peran Museum DPR RI dalam Menyosialisasikan Sejarah dan Kinerja Dewan” dan pameran Museum DPR RI bertajuk “DPR Dalam Lintasan Sejarah Bangsa” yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin-Selasa (27-28/8).

Putu mengatakan, Museum DPR RI memegang peran penting dalam merekam proses perjalanan yang sudah lebih dari tujuh dekade mulai dari tantangan, peluang, sampai dengan pencapaian. Untuk itu, ia selalu menggelorakan semangat dan berpartisipasi dalam membangkitkan kembali permuseuman di Indonesia khususnya Museum DPR RI.

Tidak dipungkiri, di era digitalisasi saat ini eksistensi museum sebagai sarana belajar, penelitian, dan memperoleh informasi terkait sejarah dan warisan budaya tersaingi dengan perkembangan digital. Segala hal sangat mudah diakses melalui penggunaan teknologi internet.

Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi X DPR RI yang notabene membidangi sejarah, pendidikan dan

budaya ini semakin tertantang untuk memajukan museum di Indonesia, khususnya di DPR RI. Baginya meskipun era digital berkembang semakin cepat namun museum tetap mempunyai penikmat setia.

“Ada semangat *edutainment* ketika orang-orang hadir ke museum mengetahui perjalanan bangsa ini. Jadi mereka datang ke sini adalah salah satu *spirit* yang berbeda, artinya ada rasa keingintahuan yang besar,” ungkap Putu di sela-sela seminar nasional dan pameran museum di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8).

Politisi Partai Demokrat ini memastikan, dirinya bersama Asosiasi Museum Indonesia tidak menutup diri untuk turut memajukan eksistensi



Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Beroperasi

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah hukum yang membelit internal PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Jawa Timur, sehingga permasalahan di TPPI tidak berlarut-larut dan segera beroperasi kembali pasca di *take over* oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direksi PT. Pertamina, Direksi PT. Tuban Petrochemical Industries serta Direksi PT. TPPI, di Tuban, Jatim, Jumat (24/8).

“Kalau ini sudah beroperasi dengan normal, maka kesejahteraan dan ketahanan energi yang kita cita-citakan akan terwujud. Sejalan dengan apa yang sudah direncanakan sejak berdirinya TPPI ini pada 1996 sebelum terjadinya krisis ekonomi dan saat ini sedang kita mulai lagi,” kata Ridwan.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu pada rapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko

Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Plt. Dirut Pertamina yang menyepakati akuisisi saham secara bertahap oleh pemerintah melalui PT. Pertamina (persero).

“Jadi Komisi VII DPR RI akan memberikan *support* secara penuh kepada pemerintah untuk menjalankan program yang telah dicanangkan bahwa Tuban Petrochemical ini akan menjadi daerah industri yang terbesar dan termodern di Indonesia,” tambah Ridwan.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan devisa nasional. Hal tersebut akan sulit diwujudkan, jika TPPI belum memproduksi kondensat dan Indonesia masih terus mengimpor kondensat hingga saat ini.



Foto: Erman/hr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

Faktor gagal bayar dari TPPI kepada Pertamina pun turut berpengaruh pada kinerja TPPI Tuban.

“Saya kira DPR akan memberikan *support* kepada pemerintah. Kalau memang dibutuhkan, harus ada aturan-aturan yang di-*backup* oleh Menteri Keuangan agar utang-utang tersebut disesuaikan kembali. Kami akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini.

■ es/sf



Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana meninjau pembukaan pameran museum

museum melalui perkembangan digital. Dengan mendorong terbentuknya Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SSKCKR) yang pembuatannya didampingi oleh

Perpustakaan Nasional.

“Jadi digitalisasi ini telah kita lakukan dan kita siapkan satu payung hukumnya dan itu nanti akan menjadi persembahan terbesar terbaik bagi peradaban abad

ini. Nantinya undang-undang ini lebih mengangkat pada konsep digitalisasi,” lanjut Putu.

Meskipun demikian, lanjut Putu, museum secara fisik juga harus berperan serta dan aktif untuk menjadi database yang komprehensif dan kuat. Pasalnya saat ini payung hukum yang ada saat ini hanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015. Ia menilai, Indonesia membutuhkan payung hukum yang lebih besar lagi, yakni UU Permuseuman.

“Dengan begitu, saya yakin bangsa ini akan betul-betul dihargai oleh bangsa lain bahkan menjadi bangsa yang adibudaya, adikuasa dalam bidang budaya dan warisan budaya. Yang tentunya ke depan, akan begitu menginspirasi dan memberikan kontribusi besar yang mengangkat kearifan lokalnya yang begitu luar biasa,” tutup politisi dapil Bali itu. ■ apr/sf

Vaksin MR Boleh Digunakan Karena Darurat

Vaksin imunisasi campak (*measles*) dan *rubella* (MR) dari Serum Institute of India (SII) sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR dibolehkan (mubah) dengan syarat ada kondisi keterpaksaan. Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menilai, kondisi keterpaksaan atau darurat karena saat ini belum ditemukan vaksin MR lain.



Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri

Foto: Andri/hr

“Darurat tersebut maksudnya, jika tidak menggunakan imunisasi, maka bisa menimbulkan penyakit. Maka vaksin MR dari India tersebut boleh digunakan, terlebih saat ini belum ditemukan vaksin MR,” kata Abidin dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8).

Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Kesehatan beserta jajarannya untuk terus

mengintensifkan komunikasi, informasi, serta edukasi tentang pentingnya imunisasi MR melalui berbagai media komunikasi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok yang menolak imunisasi. “Polemik ini harus segera dihentikan dengan penjelasan yang jelas ke masyarakat,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz. Ia mengatakan, fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) terang mengatakan vaksin MR boleh digunakan dalam kondisi darurat syariah. Terlebih, sampai hari ini, baru 3 negara yang bisa menghasilkan

Legislator Kritisi Kualitas Rendah Koper dan Seragam Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna mengapresiasi pelaksanaan ibadah Haji tahun 2018 yang berjalan lancar. Dengan sepuluh inovasi yang dicanangkan Kementerian Agama, pelaksanaan Haji berjalan cukup bagus, termasuk jemaah Haji yang meninggal dunia relatif berkurang.

“Hanya ada kekurangan yang perlu diperbaiki sejak awal saya kritisi, yaitu koper dan kualitas seragam yang kurang baik. Banyak koper jemaah Haji yang jebol dan seragam Haji Indonesia kualitas rendah, sekali cuci pudar,” ujar Choirul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8).

Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, pihaknya selalu meminta



Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna

Foto: Rumi/hr

Kemenag agar kualitas koper dan seragam Haji ini sesuai standar. Apalagi ibadah Haji berlangsung cukup lama dan berbaur dengan jutaan umat Islam

dari seluruh dunia, sehingga semua keperluannya harus terjamin kekuatan dan kualitasnya.

“Dalam melayani tamu Allah,

vaksin MR.

“Tiga negara yang menghasilkan vaksin MR itu baru Jepang, India dan China. Jepang memproduksi hanya untuk negaranya, China memproduksi, tetapi belum sertifikasi dari WHO, hanya vaksin MR dari India yang sudah tersertifikasi dari WHO,” jelasnya.

Untuk itu, politisi PPP itu berharap Menkes biasa terus mensosialisasikan pentingnya vaksin MR tersebut, terlebih Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia dengan jumlah kasus campak terbesar.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia dengan jumlah kasus campak terbesar tahun 2015. Total campak 5 tahun terakhir sebanyak 57.056 kasus.

Kasus cacat bawaan akibat rubella tahun 2017 sejumlah 960 kasus (0,2 dari 1000 kelahiran hidup). Vaksin MR merupakan perlindungan terhadap anak-anak dari cacat permanen dan kematian akibat penularan virus tersebut. Anak yang terkena rubella bisa cacat dan ibu hamil yang terkena rubella, anak yang dilahirkan bisa mengalami tuna rungu.

■ rnm/sf

para petugas dalam melaksanakannya sudah bagus. Jika kita komparasikan dengan Malaysia, pelayanan kepada jemaah Haji Indonesia jauh lebih bagus. Berbagai fasilitas termasuk maktab yang ditempati jemaah Haji cukup baik, dan menunjukkan betul-betul jemaah sebagai tamu Allah,” jelasnya.

Satu lagi yang menjadi catatan Choirul dengan dialihkannya pelaksanaan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak 6 Agustus 2018 lalu, sudah definitif bahwa badan itu mempunyai otoritas untuk membawa uang Rp100 triliun untuk diinvestasikan.

Dengan demikian, diharapkan pada musim Haji 2019 betul-betul yang diinginkan BPKH untuk mendapatkan dana optimalisasi Rp6,1 triliun itu akan terwujud. Pada akhirnya diharapkan calon jemaah Haji Indonesia akan mendapatkan biaya perjalanan Haji yang lebih murah.

“Kita harapkan dan saya mengkritisi betul supaya pelaksanaan ibadah Haji makin bagus, pelayanan tambah baik, tetapi harganya murah. Ini bisa dilakukan karena dana optimalisasi cukup besar, bukan *direct cost* tetapi *indirect cost*,” harap politisi dapil Jateng VI ini. ■ mp/sf

Banggar DPR Berharap Jatim Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin berharap Provinsi Jawa Timur bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sekitarnya. Selain sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, pergerakan ekonomi Jatim dipastikan akan tetap stabil dan meningkat.



Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin

Demikian diungkapkan Azis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Banggar DPR RI ke Surabaya, Jatim, Senin (27/8). Kunspek ini untuk memastikan bahwa penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN berjalan dengan baik serta efektif dan efisien.

“Kami melakukan kunjungan ini untuk mendapat masukan secara riil. Data secara komprehensif sudah diterima, tapi secara fisik perlu ada tindak lanjut masukan secara khusus,” ujar Azis saat memimpin rapat antara Banggar DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan mitra kerja terkait.

Selain itu, lanjut politisi Partai Golkar itu, Banggar DPR RI juga ingin mendapatkan masukan dan gambaran sejauh mana pendapatan negara dapat dioptimalkan melalui pendapatan perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data dari

Bank Indonesia (BI) perekonomian di Jatim pada Triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen hingga 6 persen dibandingkan Triwulan I 2018.

Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi didorong peningkatan konsumsi swasta dengan peningkatan permintaan pada momen hari besar seperti, Idul Fitri dan Idul Adha, serta pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Kinerja investasi juga diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Jatim.

Selain itu, perekonomian Jatim secara umum dikelola dengan baik, salah satu indikator yang bisa digunakan adalah pengelolaan inflasi yang melibatkan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam hal ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). ■ eko/sf

Foto: Eko/hr

Esai Pemenang Lomba “Kritik DPR”

KRITIK SETANDAN PISANG



Modern tidak bisa diartikan sempit terbatas pada kemajuan teknologi dan bangunan fisik semata. Modern tentu haruslah juga menyangkut soal manusianya meliputi cara berfikir dan mentalitas. Pemahaman ini perlu menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusung visi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern dan berwibawa. Pengembangan teknologi informasi guna menciptakan transparansi dan partisipasi publik tidak akan berjalan maksimal jika tidak disertai dengan manusia modern yang transparan dan demokratis. Gedung baru dan aplikasi canggih bukanlah jaminan hadirnya representasi rakyat. Proyek pembangunan fasilitas modern seringkali dikorupsi aparaturnya negara yang tak berjiwa modern.

Salah satu contoh tidak hadirnya jiwa modern adalah korupsi. Tindakan merampas kekayaan rakyat dan bangsa untuk kepentingan sendiri adalah moral purba yang belum hilang jejak masa kerajaan, kolonial, hingga terseleggarannya kehidupan bangsa yang diatur dengan sistem pemerintahan modern. Sebut saja feodalisme raja-raja nusantara yang sering merampas harta rakyat. Hal yang sama terjadi pada zaman kolonial.

Multatulli melalui karyanya berjudul Max Havellar merekam bagaimana Bupati Lebak memeras penduduk melalui kerja rodi sedemikian keras guna menutup pengeluaran kebutuhan hidup rumah tangganya. Korupsi mewarisi mental purba tersebut dengan merugikan negara.

Moral purba lainnya adalah soal penyuaipan. Kartini, perempuan modern zaman kolonial, merekam praktik penerimaan hadiah melalui surat-suratnya kepada Stella Zahendelaar sahabat penanya (Emansipasi ; Jelasutra Yogyakarta 2014). Bagi Kartini, perbuatan tersebut adalah kejahatan yang keterlaluan dan merusak. Namun ia meminta sahabatnya jangan terlalu menghukum keras perilaku pembesar bangsawanya tersebut. Kartini memahami seluk beluk mengapa hal itu terjadi.

Kesulitan-kesulitan yang dialami bangsawan dalam mengemban tugas menyebabkan terjadinya praktik penyuaipan. Dengan gajinya yang sangat sedikit, bangsawan Pribumi harus menghidupi keluarganya, menyewa rumah, memelihara bendi, sado, serta kuda tunggangan untuk melakukan turne di hutan-hutan. Jika terjadi kasus pencurian atau pembunuhan di suatu onderdistrik, seorang asisten wedono harus merogoh sakunya dalam-dalam untuk mengusut perkara dan mengejar pelaku kejahatan. Pembesar pribumi seringkali menggadaikan perhiasan istri atau anaknya guna mengusut perkara. Pengeluaran untuk perkara semacam ini banyak menyebabkan bangsawan bangkrut dan menjadi pengemis.

Jumlah pengeluaran yang besar dengan gaji

yang sangat “meremah” merupakan suatu keajaiban para bangsawan itu dapat hidup. Rakyat selalu datang di tengah kesulitan bangsawan membawakan persembahan yang oleh budaya dianggap sebagai bentuk takzim dan penghormatan. Bangsawan tersebut awalnya menolak satu dua kali setandan pisang yang datang dipersembahkan rakyat padanya. Namun pada ketiga dan keempat, ia mulai menerima dengan ragu-ragu terlebih saat melihat anak dan istrinya sendiri berpakaian robek-robek. Berkaca pada kisah Kartini, praktik korupsi dan penyuaipan yang dilakukan anggota DPR merupakan sebuah kemunduran yang lebih purba. Praktik penyuaipan pembesar pribumi dapat dimaafkan mengingat beratnya pembiayaan yang ditanggung sendiri terlebih hanya setandan pisang yang diterima.

Negara modern mengatur pembiayaan negara dari pajak rakyat. Korupsi di tengah tersedianya fasilitas, pembiayaan aktifitas dinas, kunjungan kerja, gaji cukup sungguh memalukan. Jika dahulu bangsawan disuap setandan pisang oleh rakyatnya, maka sekarang anggota DPR disuap miliaran rupiah oleh konglomerat. Konsekuensinya jelas mereka akan mengabdikan kepada siapa penyuaipnya. Setandan pisang membuat bangsawan sadar bahwa ia adalah wakil rakyat bukan kaki tangan konglomerat. Pada akhirnya, modern haruslah soal rasa kerakyatan. ■ Alif Syuhada

Bhinneka Tunggal Ika: Sikap Politik DPR Demi Kepentingan Masyarakat Majemuk atau Kelompok Tertentu?

(Kritik Konstruktif Terhadap Sikap Politik DPR)



Kita tahu, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). Hasil dari RUU yang disusun DPR adalah demi kepentingan masyarakat majemuk, bukan kepentingan kelompok tertentu. Maksud dari kepentingan masyarakat majemuk adalah bahwa semua kelompok tanpa pandang bulu turut serta merasakan “output” dari produk Undang-Undang yang dirancang DPR.

Tetapi, faktanya, produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR acapkali melahirkan diskriminasi, baik diskriminasi secara legal formal maupun diskriminasi secara sosial dan budaya. Tidak jarang Undang-Undang yang dirancang oleh DPR hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, bukan

kepentingan masyarakat majemuk. Di sinilah prinsip Bhinneka Tunggal Ika mulai luntur.

Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat salah satu Pasal yang mendiskriminasi masyarakat majemuk secara legal formal. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pasal tersebut mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketentuan yang dibuat oleh DPR ini memang terkesan memaksakan dan irasional. Misalnya, persentase kursi atau suara sah nasional yang menjadi syarat pengajuan capres dan cawapres 2019 justru diambil dari hasil Pemilu 2014. Padahal, Pemilu 2014 dan Pemilu

2019 adalah dua peristiwa hukum yang berbeda dengan landasan filosofi pemilih yang juga berbeda. Artinya, para pemilih di Pemilu 2014 tidak mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan sebagai persyaratan presidential threshold di Pemilu 2019.

Akibatnya, tidak semua partai bisa mencalonkan presiden. Demikian pun, masyarakat umum juga tidak memiliki pilihan calon yang memadai karena persyaratan capres dan cawapres mempersempit pilihan masyarakat. Memang masih terjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum mengenai konstitusionalitas presidential threshold sebagaimana yang termuat dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Di satu sisi, banyak pakar yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi ruang penuh kepada



MAU HAK KOK KERJA LAMBAN?



kategori kumulatif terbuka, antara lain konvensi internasional dan UU APBN. Pada tahun 2018 ini, telah ditetapkan 50 RUU jadi prolegnas pada forum paripurna DPR. Apakah itu bisa terealisasi?

Tahun 2018 merupakan tahun politik. Memanaskan isu-isu pemilihan presiden hingga pemilu legislatif 2019. Tentu mereka masih berambisi dalam pendudukan posisi legislatif otomatis akan lebih sibuk dengan pengurusan lobi-lobi partai, dapil masing-masing hingga kepentingan politik lainnya. Ketika tujuan hanya berorientasi pada kepentingan, maka kinerja lembaga legislatif ini tentu tidak bisa mencapai target. Bagaimana bisa mencapai target jika masih mengurus partai dan menjadikan fraksi di dewan sebagai representasi panas politik hingga mengabaikan kepentingan rakyat.

Bagaimana bisa memenuhi tanggung jawab kalau saat ini masih sibuk dengan #anggotadewan2019. Bagaimana hak rakyat yang terlegitimasi melalui peraturan bisa didapatkan jika kinerja lamban saling menyalahkan. Bagaimana kinerja bisa berhasil jika saat ini masih kerja terpolarisasi ego pribadi dan partai frontal ke yang didepan. Mau hak legislasi sepenuhnya kewenangan DPR tapi kinerja utama saja lamban. Legislasi adalah wajah DPR, jika peraturan yang dibutuhkan masih belum beres untuk menjamin kepastian, keadilan, ketertiban kepada rakyat maka akan jadi apa badan ini? ■ **Dara Salsabila**

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia menganut eksistensi bikameral yaitu antara DPR dan DPD dengan pemerintah. Pemerintah pun juga bisa membentuk undang-undang. Mekanisme ini diharapkan menjadi kontrol ganda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia dan dapat diminimalisir serta terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan rakyat. Akan tetapi dengan adanya sistem tersebut menyebabkan produk hukum yang dikeluarkan tidak koheren. Hubungan lembaga legislative dan eksekutif saat ini masih sangat inheren karena belum ada ketentuan untuk membatasi hak legislasi secara yuridis.

Tahun 2017 menjadi masa keanggotaan Dewan perwakilan rakyat menginjak pertengahan bakti tahun ketiga. Berbagai macam rencana telah dirancang dan disetujui sedemikian rupa pada periode sebelumnya untuk mencapai tujuan di tahun 2016 lalu namun tetap sama seperti tahun lalu DPR gagal dalam fungsinya sebagai badan legislatif. "Seharusnya eksekutif tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU, cukup menyatakan setuju atau tidak setuju di ujung," kata Fahri Hamzah.

Usul itupun tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) rancangan amendemen kelima UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan, "Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang

(RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)". Dalam amendemen keempat, diatur presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dengan ketentuan itu, nantinya pemerintah hanya bisa mengajukan usulan naskah RUU kepada DPR dan DPD tanpa dilibatkan dalam pembahasan. Pembahasan dan pengesahan RUU sepenuhnya menjadi kewenangan DPD dan DPR.

Sebagai gantinya, presiden akan mempunyai hak veto untuk menolak sebuah RUU yang sudah disetujui DPR dan DPD. Akan tetapi, hak veto tidak berlaku jika RUU tersebut disetujui oleh minimal dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga anggota DPD.

Saya setuju jika hak legislasi hanya ditujukan kepada DPR dan DPD karena dengan mekanisme ini akan memperkuat posisi presidensial di Indonesia. Namun berdasarkan data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau disingkat FORMAPPI diperoleh untuk tahun 2017 perancangan undang-undang telah diprioritaskan pada RUU yang terdapat di prolegnas berjumlah 52 RUU namun hasil kerjanya hanya menghasilkan 6 RUU yang disahkan. Terdapat 11 UU yang juga disahkan DPR tahun 2017, tetapi masuk

setiap partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Di sisi lain, beberapa pihak menyatakan ketentuan tersebut adalah konstitusional karena telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa persyaratan presidential threshold adalah Open Legal Policy (kebijakan hukum yang terbuka) yang bisa dirancang sesuai dengan kesepakatan politik di DPR.

Namun, terlepas dari perdebatan itu, sikap politik DPR dalam merancang Undang-Undang, khususnya terkait persyaratan presidential threshold dalam UU Pemilu, adalah bentuk egoisme politik di DPR. Sikap itu bukan demi kepentingan masyarakat majemuk yang memberi ruang bagi semua kelompok dan golongan, tetapi justru hanya demi kepentingan segelintir orang tertentu.

Undang-Undang Pemilu hanyalah salah satu contoh dari bentuk egoisme DPR. Masih ada produk-produk lain yang mencerminkan sikap politik DPR tanpa didasarkan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi kepentingan semua golongan. ■ **Abdul Waid**

PEMENANG LOMBA "KRITIK DPR"

Pemenang 1	Pemenang 2	Pemenang 3
STAND UP COMEDY		
Muhamad Aji Pratama	Marshel Widiyanto	Kiki Saputri
MEME		
Wahyu Siswanto (Lumajang)	Ricard Gandhi	Utoyo (Indramayu)
ESAI		
Alif Syuhada (Purwokerto)	Abdul Waid (Yogyakarta)	Dara Salsabila
BEST OF THE BEST Muhamad Aji Pratama		

HUT ke-73 DPR, Langkah Wujudkan Parlemen Modern

Memasuki usia ke-73, DPR RI terus melangkah maju mewujudkan Parlemen Modern dengan mencanangkan berbagai kegiatan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap, di usia 73 tahun ini, DPR RI menjadi lebih baik dalam segala hal, sebagaimana tujuan lembaga ini didirikan. Parlemen Modern yang dicita-citakan diharapkan akan segera terwujud.



Sekjen DPR Indra Iskandar

Demikian disampaikan Indra saat melaporkan rangkaian kegiatan HUT ke-73 DPR RI dihadapan Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta sejumlah tamu undangan, di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Indra menyampaikan, salah satu kegiatan yang dicanangkan dalam HUT DPR adalah *launching Open Parlemen* (OP).

“OP ini merupakan perluasan dari *Open Government Partnership* (OGP) yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. Prinsip-prinsip keterbukaan parlemen sesuai indikator utama parlemen modern akan kita dorong terus. Diantaranya keterbukaan, transparansi dan pemanfaatan teknologi sebagai media publikasi, sehingga OP menjadikan DPR lebih

OP ini merupakan perluasan dari *Open Government Partnership* (OGP) yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen

profesional, terbuka dan dekat dengan rakyat,” ungkapnya.

Sejatinya DPR RI telah menjalankan OP sejak lama, misalnya dalam hal keterbukaan. Hampir seluruh kegiatan DPR RI bersifat terbuka dan data bisa diakses publik melalui *website* resmi DPR RI dan TV Parlemen. Kemudian, pada HUT ke-73 ini, DPR RI juga meluncurkan aplikasi “DPR Now! DPR dalam Genggaman Rakyat”. Aplikasi tersebut merupakan salah satu instrumen bagi DPR RI untuk menjadikan parlemen terbuka, aplikasi ini didedikasikan untuk melayani seluruh rakyat Indonesia.

“Masyarakat akan mendapatkan semua informasi tentang DPR RI, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan dan aspirasi secara online melalui *smartphone*, mengikuti persidangan secara *live*, apapun informasi yang diinginkan masyarakat. Semua bisa diakses melalui aplikasi DPR Now!,” ungkapnya.

Terakhir, Indra menyampaikan, rangkaian HUT ke-73 DPR RI diawali Rapat Paripurna yang beragendakan penyampaian laporan kinerja tahun sidang 2017-2018, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan, yaitu Pameran Foto Warna-Warni Parlemen yang menggambarkan perjalanan DPR RI selama setahun terakhir.

Kemudian, Pameran Seni Rupa “Kepada Republik #4” yang diikuti 17 pelukis Nusantara. Dilanjutkan final *stand up comedy* pengumuman pemenang lomba “Kritik DPR” melalui meme dan esai. Sebelumnya, kegiatan seminar nasional “Optimalisasi Peran Museum DPR dalam Menyosialisasikan Sejarah dan Kinerja Dewan” dan pameran museum DPR RI dengan tema “DPR Dalam Lintasan Sejarah” pun telah digelar.

“Kegiatan dihadiri hampir seluruh sejarawan muda dari universitas ternama di Indonesia. Selanjutnya, rangkaian kegiatan HUT dilanjutkan pada tanggal 2 September dengan beberapa acara, diantaranya ‘Lomba Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat’, lomba panjat bambu betung dan lomba mewarnai untuk anak,” tutup Indra. ■ **apr/sf**

Foto: Jaka/hr



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti didampingi Sekjen DPR Indra Iskandar meninjau pameran museum bertajuk "DPR Dalam Lintasan Sejarah Bangsa" di Gedung DPR

Lestarkan Jejak Sejarah DPR RI Melalui Museum

Bicara sejarah DPR RI, berarti juga bicara sejarah perjuangan bangsa. Lintasan sejarah DPR RI bagian dari sejarah bangsa ini. Di dalam Museum DPR RI, tidak saja menyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga ada pendidikan politik untuk memahami demokrasi yang berkembang di Tanah Air.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan hal itu dalam sambutan pembukaan acara seminar nasional dan pameran museum bertajuk "DPR Dalam Lintasan Sejarah Bangsa" di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8).

"Membicarakan sejarah perjalanan DPR RI sama dengan berbicara sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini karena lintasan sejarah DPR RI adalah juga lintasan sejarah bangsa kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia hingga saat ini," kata Novi, sapaannya.

Novi lalu mengungkap cikal bakal sejarah parlemen Indonesia. Diawali saat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berdiri pada 29 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, KNIP ternyata berhasil menyetujui 133 RUU.

Pada tanggal KNIP inilah ditetapkan sebagai hari kelahiran DPR RI. Selepas KNIP, terbentuklah senat pada era Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketika itu senat beranggotakan 32 orang dan DPR beranggotakan 146 orang.

"Sejarah pernah mencatat keluarnya Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 yang isinya presiden membubarkan DPR, karena DPR hanya menyetujui Rp36 miliar

APBN dari Rp44 miliar yang diajukan," tutur politisi Partai Gerindra ini dalam sambutannya. Kini, lanjut Novi lagi, peran DPR RI kian maju, tidak saja menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, tapi juga menjalankan diplomasi perlemen di forum-forum internasional.

"Lintasan sejarah yang telah dan akan terus dilalui oleh DPR tentu meninggalkan rekam jejak berupa catatan, risalah, foto, video, film, dan berbagai benda yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR," tambah Novi. Dan keberadaan Museum DPR RI sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari parlemen Indonesia.

Museum, sambung Novi, berfungsi mengumpulkan, merawat, dan melestarikan benda-benda bersejarah. Dan Museum DPR RI juga berperan sama, bahkan bisa dijadikan objek studi, penelitian, sampai hiburan. "Museum DPR berfungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan pemahamandemokrasi di Indonesia," imbuhnya sebelum memotong pita di pintu masuk ruang pameran. ■ mh/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan sambutan saat launching aplikasi “DPR Now! DPR Dalam Genggamannya Rakyat”, di lobi Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Foto: Iw,Jk



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian tiga Anggota DPR RI PAW sisa masa jabatan 2014-2019 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung DPR RI, Selasa (28/8). Foto: Azk, Man



Sekjen DPR RI Indra Iskandar (kiri) dan Irtama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha (kanan) menyematkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 96 pegawai ASN di halaman Gedung Setjen DPR RI, Rabu (29/8). Foto: Oji